Pengembangan WISATA ALAM

DENGAN PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN

Pendekatan biaya perjalanan merupakan salah satu alat valuasi ekonomi lingkungan untuk menilai secara kuantitatif jasa sumberdaya alam seperti halnya wisata alam di Taman Nasional dan lain sebagainya. Wisata alam berbeda dengan wisata masal. Dengan tujuan agar wisata alam yang identik dengan wisata lingkungan, perlu dilakukan implementasi perhitungan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke sebuah objek wisata alam.

Buku ini menyajikan terminologi wisata alam dan beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangannya, bagus untuk dibaca para mahasiswa, akademisi dan praktisi. Anda juga dapat membaca beberapa hasil riset terkait dengan buku ini, sehingga lebih memahami dan dapat menginterpretasikan pendekatan yang digunakan.

Dr. Muhammad Safri, SE., M.Si adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, menamatkan pendidikan pada Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, S2 pada Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan IPB dan S3 pada Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB. Pernah mengecam berbagai pelatihan singkat seperti Pelatihan tingkat Dasar Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah di FE Unsyiah Kuala Banda Aceh dan tingkat intermediate di Amherst, Universitas Massachusetts di Amerika Serikat. Aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

PENGEMBANGAN WISATA ALAM DENGAN PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN

MUHAMMAD SAFRI

MUHAMMAD SAFRI

Pengembangan WISATA ALAM

DENGAN PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN

PENGEMBANGAN WISATA ALAM DENGAN PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN

MUHAMMAD SAFRI

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**PENGEMBANGAN WISATA ALAM DENGAN PENDEKATAN
BIAYA PERJALANAN**

**PENGEMBANGAN WISATA ALAM DENGAN PENDEKATAN
BIAYA PERJALANAN**

Penulis:

Muhammad Safri

ISBN : 978-623-93873-0-3

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin
penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah Swt. atas semua limpahan rahmat dan hidayahNya, dengan telah terbitnya buku, **“Pengembangan Pariwisata Alam Dengan Pendekatan Biaya Perjalanan”**. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, mudah-mudahan kehadirannya dapat memberikan sumbangan positif terhadap sisi teoritis dunia pariwisata alam, implementasi kebijakan bagi pemerintah dan para pihak lainnya maupun masyarakat umum.

Menurut hemat penulis, penerbitan buku sejenis relatif masih sangat sedikit. Hal demikian menjadi dorongan tersendiri bagi kami untuk ikut memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang mungkin bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum lainnya. Pendekatan biaya perjalanan hanyalah sebagai sebagai satu alat penilaian dalam valuasi ekonomi lingkungan, dengan demikian uraian dalam buku ini akan dapat ikut menambah khasanah pemikiran dan penerapannya dalam kebijakan nyata.

Akhirnya semua masukan yang sifatnya membangun akan diterima dengan senang hati dan kepada penerbit Pena Persada yang telah melakukan kerjasama dan bersedia menerbitkan buku ini, secara khusus terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Jambi, Mei 2020

Muhammad Safri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PARIWISATA ALAM.....	6
A. Pariwisata Kembali ke Alam.....	6
B. Pariwisata Berkelanjutan	10
C. Sejarah Taman Nasional	15
BAB III OTONOMI DAERAH	22
BAB IV PARIWISATA ALAM DAN AKULTURASI	
BUDAYA.....	27
BAB V KEMAJUAN EKONOMI LINGKUNGAN	29
BAB VI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	31
BAB VII PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN	36
A. Evaluasi Ekonomi	36
B. Pwndwkatan Biaya Perjalanan	38
C. Permintaan Dalam Kepariwisataaan	39
D. Permintaan dan Penawaran (<i>Supply and Demand</i>)	42
BAB VIII PARIWISATA MENINGKATKAN EKONOMI	45
A. Laju Pembangunan Ekonomi	46
B. Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Daerah.....	47
BAB IX PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI INDUSTRI	
PARIWISATA DALAM MENUNJANG OTONOMI	
DAERAH	49
BAB X PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang melimpah dan beragam. Keberagaman kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti potensi alam, flora, fauna, panorama alam dengan berbagai wilayah yang kaya akan adat istiadat, kebudayaan, dan bahasa memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang dapat mendorong pemerintah untuk mendirikan industri pariwisata khususnya di daerah masing-masing yang mempunyai potensi wisata untuk dapat menarik wisatawan berkunjung ke daerahnya sehingga dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pendapatan masyarakat menyebabkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Salah satunya adalah jasa perjalanan wisata yang ditawarkan oleh industri-industri pariwisata akhir-akhir ini. Perjalanan wisata merupakan kegiatan meninggalkan tempat tinggal untuk berlibur mencari udara segar yang baru untuk memenuhi rasa ingin tahu, ketenangan saraf, maupun menikmati keindahan alam. Berpariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggal (Swantoro, 1997 :3 dalam Igunawati, 2010).

Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Letak geografis Indonesia yang diapit 2 benua (Asia dan Australia) menjadi lokasi yang strategis bagi para wisatawan mancanegara untuk berlibur. Ditambah lagi rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tentu menambah daya tarik sektor pariwisata Indonesia. Dengan adanya potensi sektor pariwisata di Indonesia, hal ini dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri. Pariwisata juga bermanfaat dalam meningkatkan lapangan kerja, taraf hidup, dan pendapatan masyarakat (Famytyas, 2014).

Perkembangan kegiatan ekowisata di Indonesia lebih mengarah pada kawasan yang dilindungi (kawasan hutan konservasi) karena obyek daya tarik wisata alamnya yang lebih tinggi. Salah satu lokasi tujuan kegiatan ekowisata yaitu kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam (Premono B. et al, 2008). Pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu menggalakan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa (Joyosuharto, 1995 dalam Soebagyo, 2012).

Pariwisata merupakan sektor yang sangat kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu kegiatan pariwisata sebagai kegiatan matarantai akan melibatkan berbagai sektor dan lembaga yang terkait. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kecenderungan perkembangan dunia pariwisata mulai meninggalkan konsep pariwisata massal dan mengarah kepada konsep pariwisata lingkungan (ecotourism), dimana keaslian potensi kekayaan alam dan peran serta masyarakat setempat dibutuhkan. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan terutama wisata alam. Penilaian terhadap suatu kawasan wisata memiliki

peranan yang dapat menentukan pengembangan dari tempat wisata itu sendiri yang mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan nilai sosial dan politik. Menurut Ward et.al, 2000 (dalam Rahardjo) metode penilaian khususnya untuk mengukur nilai ekonomi wisata alam yang paling banyak dipakai adalah Travel Cost Method (TCM). Metode ini menduga nilai ekonomi kawasan wisata berdasarkan penilaian yang diberikan masing-masing individu atau masyarakat terhadap kenikmatan yang tidak ternilai (dalam rupiah) dari biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke sebuah objek wisata, baik itu opportunity cost maupun biaya langsung yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, konsumsi makanan, minuman, hotel, tiket masuk dan sebagainya.

Secara ekonomi pariwisata massal telah memberikan manfaat yang besar, akan tetapi aspek sosial dan lingkungan kurang diperhatikan. Selain itu, dampak positif dari aspek ekonomi pariwisata massal kurang dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut Sihite (2000), hal ini antara lain disebabkan pariwisata massal lebih banyak menggunakan fasilitas atau bahan impor sehingga dampak gandanya (*multiplier effect*) bagi masyarakat setempat sangat kecil. Penggunaan sarana pariwisata yang berasal dari modal asing (misalnya hotel), juga menyebabkan kurangnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam aspek sosial dan lingkungan, Soemarwoto (2001) menyatakan bahwa pariwisata massal telah menimbulkan berbagai permasalahan. Masyarakat setempat dalam pariwisata massal dapat terusir akibat konversi lahan pertanian untuk pembangunan prasarana pariwisata yang tidak terkendali. Rumah-rumah asli penduduk dan bangunan yang bernilai sejarah berkurang keasliannya karena terlalu menekankan aspek komersial. Pariwisata massal juga menyebabkan peningkatan tindak kejahatan atau munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma adat setempat. Nilai-nilai asli kesenian maupun upacara tradisional akan berkurang keasliannya karena perubahan orientasi yang cenderung komersial.

Pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada manfaat ekonomi mengurangi jumlah dan mutu sumberdaya hutan. Menurut Bank Dunia (2001) dan Alikodra (1998), laju penggundulan hutan di Indonesia periode 1985 sampai 1987 sebesar 16.5% atau 1 641 708 ha per tahun. Fenomena ini salah satu contoh tidak diperhitungkannya daya dukung alam. Kunjungan wisatawan yang terlalu besar dan tidak terkendali ke sebuah kawasan jelas akan mempengaruhi lingkungan setempat. Habitat satwa akan terganggu oleh keriuhan suara pengunjung, atau oleh suara kendaraan, dan sampah-sampah cenderung dibuang di sembarang tempat. Tindakan yang tidak terpuji lainnya berupa penebangan hutan/kayu untuk bahan bangunan sarana pariwisata, penggunaan tanah dan air/sungai yang kurang memperhatikan kelestarian. Terdapat corat coret fasilitas penunjang pariwisata, atau tanda-tanda reklame yang mengurangi keindahan alami.

Untuk meminimalisir dampak negatif pariwisata massal, dewasa ini berkembang pariwisata alam atau lebih dikenal dengan ekoturisme (*ecotourism*). Pariwisata ini dianggap sebagai salah satu pendekatan wisata yang bertanggung jawab, wisata yang berorientasi konservasi, dan wisata yang berkelanjutan. Wisatawan memilih melakukan perjalanan ke kawasan alami untuk berpetualang, mengagumi dan menikmati keindahan alami. Menurut Kodhyat (1998), keuntungan ekoturisme antara lain, 1) memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, 2) tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, dan 3) keberlanjutannya lebih terjamin. Ziffer & Young (1989) menambahkan bahwa keuntungan ekoturisme adalah: 1) meningkatkan perolehan dana konservasi, 2) meningkatkan pembangunan ekonomi, dan 3) menghindari pengrusakan sumberdaya alam.

Industri pariwisata dalam tahun 1997 secara global menghasilkan US \$ 3.8 triliun Hasil Bruto (*Gross Output*) dan 262 juta pekerjaan di seluruh dunia. Diperkirakan perolehan tersebut dalam tahun 2007 akan tumbuh menjadi US\$ 7.1 triliun Hasil

Bruto dan 383 juta pekerjaan (Yoeti 1999). Lebih lanjut, Yoeti (1999) menyatakan bahwa untuk Indonesia pada tahun 1997 diperoleh Hasil Bruto sebesar Rp 64.480 milyar dan 6.6 juta pekerjaan dan untuk tahun 2007 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 248.363 milyar Hasil Bruto serta 8.5 juta pekerjaan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata massal memberikan sumbangan yang signifikan dalam ekonomi

BAB II

PARIWISATA ALAM

A. Pariwisata Kembali Ke Alam

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara peneri ma wisatawan. James J. Spillane (1989) dalam Badrudin (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari kepuasan, mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis pariwisata, menurut James J. Spillane (1989) dalam Badrudin (2000) yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik customer untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut.

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism)
Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, untuk mengendorkan ketegangan syarafnya, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya.
2. Pariwisata untuk rekreasi (recreation sites) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
3. Pariwisata untuk Kebudayaan (cultural tourism) Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi

seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya.

4. Pariwisata untuk Olahraga (sports tourism) Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktikkannya sendiri.
5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (business tourism) Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.
6. Pariwisata untuk konvensi (convention tourism) Banyak negara yang tertarik dan menggarap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang convention tourism.

Semboyan kembali ke alam (*back to nature*) mengisyaratkan kembalinya kesadaran orang akan peran alam dan sumberdayanya. Orang mulai berpaling kembali untuk menikmati atau mengagumi keindahan alam dan hidup secara alami-bersahabat dengan alam. Keinginan ini pada gilirannya melahirkan minat orang-orang untuk melakukan kegiatan wisata alam. Pariwisata alam atau yang lebih dikenal dengan “ekoturisme” didefinisikan sebagai perjalanan ke daerah-daerah yang masih alami yang dapat mengkonservasi dan memelihara kesejahteraan masyarakat setempat (*The Ecotourism Society 1993*).

Dalam perkembangan berikutnya, pariwisata alam telah berhasil mengembangkan perekonomian berbagai negara di dunia. Pariwisata ini pada mulanya dikembangkan di negara-negara Amerika Latin dan Afrika, dan sekarang telah berkembang dengan pesat di USA, Canada, Australia, negara-negara Eropa bahkan di Asia. Mereka memelihara dan menata

obyek-obyek wisata alam kemudian mempromosikannya sehingga menarik minat para wisatawan. Negara Thailand yang pada puluh tahun lalu banyak menghasilkan devisa dari sektor pariwisata lain, telah merubah strategi dan orientasi pariwisatanya menjadi berbasiskan pariwisata alam. Roznava, sebuah negara di Eropa Timur berhasil dengan pariwisatanya yakni dengan mengembangkan Pusat Latihan Pariwisata Pedesaan dan memilih pemimpinnya dari komunitas masyarakat lokal setempat (Clarke et al. 1999).

Di Rwanda, Varunga Volcanoes dibuka untuk wisatawan. Mereka dikenai biaya US \$ 170 sejam untuk melihat gorila. Iuran ini telah menghasilkan lebih dari US \$ 1 juta dari karcis pintu masuk, dan kunjungan wisatawan ini telah memberikan intensif yang kuat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan untuk melindungi gorila, yang sekarang merupakan sumber penghasilan utama. Pemerintah Kanada juga mendapatkan dampak positif. Pada tahun tahun 1987 saja dampak pariwisata alam terhadap GDP sebesar Can \$ 6,5 miliar, pemasukan dari sektor pajak sebesar Can \$ 2,5 miliar, terhadap pendapatan per kapita sebesar Can \$ 3,7 miliar, dengan membuka lapangan kerja bagi 159 ribu orang (Alikodra 1999). Secara keseluruhan, industri pariwisata (*ecotourism*) di Afrika Selatan telah menjadi industri nomor tiga terbesar yang menyumbang pertumbuhan ekonomi negara tersebut setelah sektor industri dan pertambangan (Loon 2001).

Untuk Indonesia, pada tahun 1984 telah lahir Lembaga Studi Pariwisata Indonesia (LSPI). Lembaga ini sejak awal berdirinya telah telah berwawasan ekoturisme, sebab lembaga tersebut telah memiliki pandangan mengenai konsep pariwisata berwawasan lingkungan. Pada Januari 1996, lembaga dimaksud menyelenggarakan sebuah simposium tentang ekoturisme yang menghasilkan prinsip, kriteria serta definisi ekoturisme yang sesuai bagi Indonesia. Menurut INDECON - *Indonesia Ecotourism Network* (1996), ekoturisme sebenarnya merupakan penyelenggaraan wisata bertanggung

jawab di tempat-tempat alami dan/ atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaedah alam, yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan kebudayaan) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh Omans (1995) dalam jurnalnya ditambahkan bahwa melalui pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan yang didapat oleh seorang ekoturis maka akan terbangun pengertian yang lebih besar, perubahan sikap serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Tosun (2000), khusus untuk isu-isu lingkungan yang berkenaan dengan pariwisata alam di negara-negara berkembang lebih banyak tergantung pada kondisi sosial politik dan ekonomi negara setempat. Untuk itu harus ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional guna menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip dan kriteria ekoturisme dimaksud sebagai berikut:

1. Memiliki kepedulian, tanggungjawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, dengan kriteria-kriteria: memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan ekoturisme, mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan daerah tujuan ekoturisme, meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku ekoturisme terhadap lingkungan, memanfaatkan sumberdaya lokal secara lestari, meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan, bersifat ramah lingkungan untuk menjamin kesinambungan usaha.
2. Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat, dengan kriteria-kriteria: pembangunan hubungan kemitraan dengan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekoturisme, menginformasikan secara jelas dan benar arah pengembangan kawasan tersebut kepada masyarakat setempat, memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bisa menerima atau menolak pengembangan ekoturisme.

3. Memberi manfaat kepada masyarakat setempat, dengan kriteria: membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekoturisme baik secara aktif maupun pasif, memberi pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat, kriteria-kriteria: kode etik bagi wisatawan harus diperkenalkan kepada pengelola dan wisatawan.
5. Memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan, secara konsisten: Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Keppres nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

B. Pariwisata Berkelanjutan

Industri pariwisata masih terus diteliti dengan cermat untuk menemukan kriteria yang dapat mendukung wisata yang berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan mewujudkan sebuah tantangan untuk membangun pariwisata dunia yang kualitas produknya relatif tidak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Wisata berkelanjutan disamakan dengan sejumlah istilah, seperti wisata alternatif, wisata pedesaan, wisata hijau, wisata yang pantas, wisata yang bertanggung jawab, atau wisata progresif. Namun, kritik telah dilontarkan terhadap wisata alternatif karena memberi kesan merupakan sebuah konsep yang elitis dan

menempatkannya pada suatu skala dimana wisata massal berlawanan dengan wisata alternatif.

Pembangunan berkelanjutan dapat diberi batasan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari aspek fisik, kimia, biologi serta sosial ekonomi (Suratmo 1999) atau secara singkat dapat dikatakan sebagai pembangunan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Weight (1996), pariwisata berkelanjutan disamakan dengan kawasan pedesaan dalam suatu terminologi inti persoalan menjadi wisata alternatif, wisata pedesaan, wisata hijau, wisata yang tepat/sesuai, wisata yang bertanggungjawab atau wisata progressif. Berkelanjutan dalam pariwisata harus melestarikan lingkungan dalam jangka panjang, serta aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat (Marin and Jafari 2002). Terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan untuk pariwisata berkelanjutan, yaitu: 1) diversifikasi aktivitas wisata; 2) hubungan antar *stakeholders*, masyarakat setempat, pengelola pariwisata, perencana dan manajer lingkungan; 3) komponen masyarakat lokal dan kapasitas *entrepreneur*. Ekoturisme banyak digunakan oleh berbagai pihak sebagai solusi bagi masalah yang ditimbulkan oleh wisata massal. Ekoturisme seharusnya tidak dipandang sebagai alternatif bagi wisata massal, namun dianggap sebagai salah satu pendekatan bagi wisata yang bertanggung jawab, wisata yang berorientasi konservasi, dan wisata yang berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan memasukkan sebuah tantangan untuk mengembangkan kapasitas dunia wisata dan kualitas produk tanpa merugikan lingkungan (Weight 1996).

Pariwisata berkelanjutan dengan kata lain merupakan kegiatan wisata yang diselenggarakan dengan berazaskan prinsip-prinsip ekologis dan ekonomis. Secara ekologis

kegiatan tersebut selalu diharapkan memelihara keseimbangan yang dinamis dari ekosistem daerah tujuan wisata. Daerah tujuan wisata diharapkan akan tetap menjadi asset wisata yang terpelihara. Daerah tujuan wisata berupa kawasan konservasi tetap berfungsi sebagai kawasan konservasi, demikian pula jika daerah tujuan wisata itu merupakan kawasan budidaya, maka daya dukungnya dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.

Dimensi kemanusiaan pariwisata berkelanjutan terbagi atas dua bagian. Pertama, dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya. Kedua, dimensi struktur produksi yang terdiri dari kualitas produk dan pelayanan. Sedangkan dimensi ekosistem terdiri dari empat bagian. Pertama, dampak lingkungan umum. Kedua, kualitas ekosistem dari air, udara dan tanah. Ketiga, plasma nutfah flora dan fauna dan keempat kebijakan manajemen dan lingkungan (Ko James 2001).

Ditinjau dari sudut lingkungan, tujuan wisata tersusun oleh komponen fisik, biotik, sosial ekonomi dan budaya. Ketiga aspek itu membentuk kesatuan ekosistem yang saling terkait satu sama lain. Perubahan yang terjadi pada salah satu unsur cepat atau lambat akan berdampak pada unsur yang lainnya. Unsur budaya mencakup nilai-nilai kepercayaan, perilaku, kebiasaan, moral, seni, hukum, dan sejarah yang harus dihormati sehingga tidak menimbulkan friksi-friksi budaya yang dapat menyebabkan timbulnya konflik.

Dalam prakteknya, industri ekoturisme sering ditentukan oleh faktor penawaran (*supply*) dan faktor permintaan (*demand*). Penyedia jasa secara khusus banyak yang tertarik untuk pengembangan penawaran guna merespon permintaan pasar. Padahal, permintaan dan orientasi yang memfokuskan pada permintaan akan menjadi tidak seimbang dan belum tentu cocok dengan industri ekoturisme.

Atas dasar kekuatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisatawan terhadap lingkungan alami, perlu diperhatikan beberapa tehnik untuk memperkecil dampak perjalanan wisatawan (Weight 1996). Teknik tersebut, pertama wisatawan harus dibagi atas kelompok kecil kurang dari 10 orang. Kedua, harus ada persiapan makanan dan minuman. Ketiga, tidak mencemari sumber (mata) air dengan limbah. Keempat, membawa atau membuang sampah ke luar areal atau pada tempat yang telah ditentukan. Kelima, berjalan pada jalan setapak

yang telah ditentukan. Keenam, menyarankan pada pengunjung agar menggunakan sepatu *boot*. Ketujuh, memilih tempat yang cocok untuk perkemahan. Kedelapan, hanya menggunakan ranting-ranting pohon yang sudah mati (jatuh ke tanah) bila diperlukan sebagai kayu bakar.

Beberapa masalah atau dampak negatif yang membuat kegiatan ekoturisme tidak berkelanjutan, berhubungan dengan kenyataan bahwa prinsip-prinsip dasar ekoturisme tidak diakomodasikan ke dalam konsepsi, perencanaan desain, pengembangan, kegiatan, atau pemasaran produk. Seringkali operator wisata swasta atau bahkan pemerintah terjebak pada penggunaan ekoturisme untuk menjual suatu wilayah atau produk dengan berorientasi kepada kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa memperdulikan prinsip-prinsip ekoturisme. Padahal bumi menghendaki kesadaran etis dari para pelancong akan nilai-nilai pelestarian yang tinggi.

Ekoturisme adalah sebagai sebuah pengalaman perjalanan alami disertai penerangan yang memberi kontribusi terhadap konservasi ekosistem yang menarik bagi integrasi komunitas. Ekoturisme memberikan suatu perspektif nilai dan sumberdaya alam dan berimplikasi kepada terjadinya suatu keseimbangan dalam hal sumberdaya alam, industri pariwisata, masyarakat lokal dan pengunjung.

Paling tidak, untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di kawasan lindung adalah perlu memperhitungkan 3 (tiga) potensi dampak yang dapat membahayakan kondisi hutan, yakni: menyangkut pemahaman para wisatawan, jumlah pengunjung dan tekanan terhadap kawasan hutan untuk akomodasi dan/atau kebutuhan kegiatan pariwisata.

Pemahaman wisatawan akan manfaat kawasan hutan terkadang masih kurang sehingga mereka adakalanya melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu flora, fauna maupun ekosistem hutan tropika baik sengaja maupun tidak sengaja. Sampah berceceran, pohon-pohon ada yang dirusak/tebang. Sedangkan jumlah pengunjung yang terlalu banyak akan dapat mengganggu proses ekologi yang terjadi di hutan tropika.

Menurut Weight (1996), terdapat 9 (sembilan) prinsip dasar untuk pariwisata berkelanjutan meliputi:

1. Tidak mendegradasi sumberdaya dan mengembangkan sikap lingkungan.
2. Menciptakan partisipasi dan memenuhi persyaratan pengalaman.
3. Memberikan pendidikan atas semua anggota komunitas lokal, NGO, industri dan pariwisata sebelum, sesudah dan selama perjalanan.
4. Pertemuan yang muncul oleh kesadaran semua anggota terhadap nilai-nilai intrinsik dari sumberdaya.
5. Adanya pengakuan atas nilai-nilai sumberdaya dengan terminologi yang ada serta adanya kesadaran atas Batasan-batasannya.
6. Peningkatan pengertian dan *partnership* antara pelaku, termasuk pemerintah; NGO, industri, keilmuan dan masyarakat lokal.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab etika menuju pada perilaku yang alami dan lingkungan budaya oleh semua pelaku pariwisata.

8. Memberi manfaat jangka panjang pada sumberdaya lokal, masyarakat setempat, industri, keilmuan, sosial, budaya atau ekonomi.
9. Pelaksanaan ekoturisme memberi jaminan atas etika tanggung jawab praktek lingkungan.

Pariwisata alam bersifat minat khusus dan jika berkembang menjadi pariwisata massal, maka jumlah kunjungan wisatawan yang banyak akan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik oleh karena pembangunan sarana prasarana, pembuangan sampah sembarangan ataupun gangguan terhadap flora dan fauna yang terdapat di dalam kawasan wisata. Untuk itu diperlukan tindakan pengendalian dalam manajemen pengelolaan kawasan wisata alam..

C. Sejarah Taman Nasional

Indonesia termasuk salah satu negara (selain Brazil, Colombia dan Meksiko) yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (Alikodra, 1999). Terdapat 515 jumlah jenis mamalia, 1 519 jumlah jenis burung dan 601 jumlah jenis reptil serta lebih dari 100 spesies biji-bijian, akar-akaran, sagu atau tanaman penghasil gula yang digunakan masyarakat sebagai sumber karbohidrat. Selain itu terdapat 450 jenis spesies sebagai sumber vitamin dan mineral. Juga terdapat 70 spesies rempah-rempahan dan 40 spesies lainnya yang digunakan sebagai minuman. Masyarakat Indonesia juga memanfaatkan lebih dari 100 spesies tanaman berkayu untuk bangunan rumah dan konstruksi lainnya. Jenis-jenis flora-fauna tertentu di dunia yang hanya memiliki Indonesia misalnya; Melati-Jasminum Sambac, dan berbagai jenis bunga anggrek. Salah satu jenis anggrek tersebut yaitu anggrek bulan-Dendrobium Phalaenopsis, bunga Padma Raksasa-Rafflesia Arnoldi atau lebih dikenal dengan nama bunga bangkai atau bunga Rafflesia (sesuai dengan nama penemunya); hutan jati; biayak-komodo;